

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bretton Woods System adalah kejadian penting dalam *scope* moneter internasional. *Bretton Woods System* merupakan proses awal dari munculnya sistem moneter internasional. Sistem moneter yang dimaksudkan disini adalah suatu sistem dimana adanya suatu integrasi perekonomian internasional dan didalamnya terdapat aturan-aturan tertentu seperti penggunaan *exchange rate*. *Bretton Woods System* dilatarbelakangi dengan adanya krisis pada pra dan pasca perang dunia II tepatnya semenjak peristiwa *great depression* pada tahun 1930. Pembentukan *Bretton Woods System* ini disertai dengan harapan dari negara-negara agar sistem moneter internasional dapat berjalan secara efektif.¹ Dengan sistem moneter internasional yang efektif diperkirakan kasus terjadinya krisis berkepanjangan yang merambat dapat dicegah karena pada umumnya proses krisis itu sendiri terjadi dan menyebar pada

¹ Frieden, Jeffrey A. 2006. "The Bretton Woods System in Action", dalam *Global Capitalism: It's Fall and Rise in the Twentieth Century*. New York: W.W. Norton & Co. Inc., pp 278.

lingkup region lalu membesar atau dapat disebut juga dengan krisis domestik yang melebar.²

Sistem Bretton Woods melahirkan institusi-institusi tertentu seperti *General Agreement Tariffs and Trade (GATT) / World Trade Organizations (WTO)*, *International Monetary Fund (IMF)*, dan *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, GATT merupakan institusi yang berfungsi dan berupa suatu tempat bagi anggotanya untuk menyampaikan aspirasi tertentu yang kemudian diterapkan.³ GATT melakukan kebijakan mengurangi tarif dan memberikan penerapan hambatan-hambatan lain dalam perdagangan internasional. IMF dan IBRD merupakan institusi yang berfungsi untuk mengatur moneter dan investasi dalam lingkup internasional. IMF berfungsi untuk menciptakan suatu kebijakan dalam menentukan nilai mata uang tetap dan membuka pasar dalam mata uang yang bertujuan untuk mendorong investasi perdagangan.⁴

Kemunculan sistem Bretton Woods ini memberikan beberapa dampak positif dalam bidang ekonomi dunia. Dengan adanya sistem Bretton Woods tingkat perdagangan di dunia semakin meningkat dimana pasca tahun 1950-an tingkat ekspor tumbuh sebanyak 8,6% per tahun bagi negara-negara maju yang menggunakan sektor industri.⁵ Sistem Bretton Woods selain menunjukkan kesuksesannya dalam menerapkan perdagangan internasional juga terlihat sukses dalam menerapkan

² *Ibid.*

³ *Ibid*, hal. 281

⁴ *Ibid*, hal. 283

⁵ *Ibid*, hal. 285

kebijakan moneter. Terbukti dengan dibentuknya IMF sebagai institusi moneter internasional.⁶ Dalam sistem Bretton Woods kebijakan moneter disepakati untuk tetap menjaga nilai mata uang agar tetap stabil dan membuka pasar mata uang untuk mendorong investasi perdagangan dalam jangka panjang.⁷

Institusi bentukan sistem Bretton Woods tidak hanya IMF yang mengurus tentang sistem moneter internasional dan GATT yang mengurus tentang perdagangan internasional, tetapi sistem Bretton Woods juga membentuk IBRD yang dikenal sebagai Bank Dunia yang tugasnya mengurus masalah investasi internasional. Fungsi utama dari Bank Dunia adalah memberikan pinjaman jangka panjang kepada negara-negara yang mengalami masalah mengenai keseimbangan keuangan dalam negeri terutama dalam membenagun kembali kehidupan internal di negara mereka paska krisis ataupun perang. Adanya kebijakan investasi internasional ini juga memunculkan aktor-aktor baru selain *state*, salah satunya adalah MNC atau *multinational corporation*.⁸

Runtutan keberhasilan dari sistem Bretton Woods dalam menerapkan perdagangan, investasi, maupun moneter tidak terlepas dari keinginan integrasi yang kuat paska perang, khususnya bagi negara-negara yang *notabene* industri maju untuk membentuk kerjasama yang baik tanpa harus berkonflik dengan negara lain. *Kebijakan Welfare State* yang dibentuk oleh Jerman, Amerika Serikat, Italia, Swedia, dan Belgia

⁶ Ibid, hal. 290

⁷ Ibid, hal. 292

⁸ Ibid, hal. 293

ini ikut mengurangi hambatan-hambatan yang ada dalam perdagangan internasional namun masih melindungi industri-industri kecil di dalam negeri mereka sendiri.⁹ Keberhasilan dari penerapan *Welfare State* ini adalah penurunan tingkat pengangguran rata-rata di negara-negara yang tergabung dalam OECD, yang awalnya pada masa *gold standart* mencapai 5% kemudian pada masa perang 8% dan setelah menerapkan *Welfare System* menjadi 3%.¹⁰

Namun tidak sepenuhnya sistem Bretton Woods memberikan dampak positif, berkaca dengan yang terjadi di Indonesia pada penghujung 1997 yakni krisis ekonomi telah melipatgandakan penduduk miskin di Indonesia. Menurut laporan BPS, kemiskinan (pada Juni 1998 ketika krisis) ada sekitar 39 % sedangkan UNDP/ILO mencatat proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan melompat dari 11% menjadi 48%.¹¹ Sementara itu dalam rangka pemulihan krisis, pemerintahan yang sudah berada di ujung kejatuhan mengundang IMF untuk menyelesaikan krisis, dan sebagai syaratnya pemerintah menandatangani *Letter of Intent* (LOI). LOI ini berisi program-program penyelesaian struktural yang berisi tiga hal pokok, yakni liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Namun opsi-opsi yang ditawarkan institusi Bretton Woods tidaklah berjalan sesuai dengan yang diharapkan Indonesia pun bangkrut seiring dengan jatuhnya pemerintahan presiden Soeharto.

⁹ Ibid, Hal. 278-279

¹⁰ Ibid, Hal. 299

¹¹ MM Billah.2000."Melawan Pemiskinan (daripada Mengurangi Kemiskinan) : Satu Perspektif – Tanding dari Ornop Atas Paradigma Arus – Utama", Dalam *Masih Adakah Alternatif di Ujung Krisis*, INFID : Jakarta, hal. 86.

Dalam hal lain, permasalahan di suatu negara tidak boleh disamaratakan masalahnya dan begitu juga cara penyelesaian masalahnya. Di Indonesia sendiri IMF bukanlah sekumpulan malaikat yang dengan sekali sentuh saja akan menyembuhkan “penyakit” ekonomi RI. Dengan pengurangan subsidi BBM justru membuat rakyat kelabakan menanggung kenaikan itu. Dan selama masa pemerintahan SBY, harga BBM sudah naik empat kali. Pada periode pertama SBY memerintah dengan Jusuf Kalla sebagai wakilnya, 2004-2009, harga BBM tiga kali naik. Kenaikan pertama terjadi pada 1 maret 2005, hanya empat bulan sesudah SBY dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2004. Saat itu harga BBM naik karena lonjakan harga minyak dunia.¹²

A. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang di uraikan di atas , maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

Bagaimana pengaruh institusi Bretton Woods dalam melemahkan peran negara di Indonesia?

B. Kerangka Pemikiran/Teori

1. Teori Skeptis Globalisasi

Teori globalisasi dapat dipetakan ke dalam dua kategori atau aliran, yaitu *globalist* dan *skeptics*. Pertama, aliran globalis yakni mereka yang mempertimbangkan bahwa globalisasi dalam makna kontemporer merupakan sesuatu yang nyata dan penting bagi sejarah

¹² m.cnnindonesia.com/nasional/20140828162430-12-1997/pasang-surut-harga-bbm-setiap-rezim/

pembangunan. Kedua, aliran skeptic, yakni mereka yang memahami globalisasi sebagai ideologi utama atau konstruksi sosial yang memiliki penjelasan terbatas.

*Accepting this heterogeneity, it is nevertheless, feasible to identify a clustering of argument around between those who consider that contemporary is a real and significant historical and development the globalist and those who conceive it as primarily ideological or social construction which has marginal explanatory.*¹³

Globalisasi seperti dikemukakan oleh Paul Hirst dan Graham Thompson memiliki kelemahan mendasar, khususnya pada tiga hal. Pertama tidak ada model ekonomi global baru yang telah diterima secara umum dan jelas-jelas berbeda dari ekonomi internasional sebelumnya; kedua, karena tidak ada model yang jelas sebagai patokan untuk mengukur arah perkembangan ekonomi dunia, maka tidak ada tendensi untuk menyebut begitu saja contoh-contoh dari sektor dan proses-proses yang telah mendunia, seolah-olah contoh didominasi oleh kekuatan pasar global yang otonom; ketiga, tidak ada penyelidikan sejarah, yakni ada kecenderungan untuk melukiskan perubahan-perubahan mutakhir sebagai sesuatu yang unik, tanpa preseden di masa lalu, dan dianggap pasti akan terus berlanjut di masa depan.¹⁴

¹³ Held David & McGrew Antony. *The Global Transformation Reader, An Introduction to the Globalization Debate*, 2nd ed., Cambridge: Polity Press in Association with blackwee Publishing Ltd 2003, hal 78

¹⁴ John Baylis and Steve Smith. *The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations*, Oxford University Press, 1998, p. 14

Lalu lintas modal tidak mengakibatkan berpindahnya modal dan kesempatan kerja secara besar-besaran dari negara maju kenegara berkembang. Sebaliknya, penanaman modal asing justru terpusat di negara-negara industri maju. Sedangkan dunia ketiga, kecuali segelintir negara industri baru, tetap menempati posisi di pinggiran, baik dari investasi maupun perdagangan. Pada kenyataannya, perdagangan, investasi dan arus dana justru terpusat di wilayah Tritunggal seperti Eropa, Amerika Utara dan Jepang. Kekuatan ekonomi tritunggal ini memiliki kemampuan untuk mengatur pasar modal dan aspek-aspek ekonomi lainnya.

Melalui globalisasi inilah negara dunia ketiga masuk ke dalam sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan perdagangan bebas dimana peran negara sangat dijauhkan. Instrument globalisasi yang diciptakan berupa lembaga keuangan internasional membuat negara pengutang makin tergantung. Sebagian negara pengutang terdapat di negara-negara dunia ketiga. Aktor globalisasi berupa lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia bertugas memberikan hutang kepada negara miskin. IMF adalah gagasan Keynes dan Dexter melalui perjanjian di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Perjanjian tahun 1927 itu menegaskan bahwa IMF bertujuan untuk menciptakan lembaga

demokratis yang menggantikan kekuasaan para banker dan pemilik modal internasional.¹⁵

Bagi Indonesia, pengaruh globalisasi sudah memainkan peran penting dalam perkembangan di Indonesia. Baik di dalam kemajuan bidang IPTEK, industri, ekonomi, namun daya saing yang dimiliki Indonesia tidaklah kuat sehingga Indonesia cenderung menjadi negara yang konsumtif. Banyak harapan dengan adanya pasar bebas agar industri mikro mampu berkembang dan bersaing dengan industri luar negeri ternyata tidak menjadi kenyataan yang terjadi produk-produk luar negeri yang membanjiri Indonesia, banyak industri mikro gulung tikar, dicabutnya subsidi sehingga menyebabkan harga barang-barang pokok melonjak tinggi, dan peran pemerintah yang terkesan tidak melindungi industri dalam negeri. Sedangkan Bank Dunia sebagai aktor globalisasi memiliki misi utama membantu mengurangi kemiskinan dan membiayai investasi untuk pertumbuhan ekonomi.¹⁶

Pada kenyataannya berbagai program Bank Dunia maupun IMF tidak sesuai dengan misi sesungguhnya. Kebijakan-kebijakan IMF dan Bank Dunia lebih menguntungkan negara kaya. Berbagai kebijakan privatisasi negara telah meluruhkan peran negara sebagai pemberi subsidi yang sangat dibutuhkan rakyat miskin. Kedua lembaga itu menjadi pendukung utama model ekonomi liberal yang

¹⁵ Mansour Fakih, *Pembangunan Pelajaran Apa Yang Kita Peroleh?*, pengantar Jurnal Wacana, edisi 5 tahun II, Yogyakarta: INSIST Press, 2000

¹⁶ Ibid, hal. 7

semakin memiskinkan jutaan penduduk dunia. Hal ini karena kebijakan-kebijakan mereka memang tidak ada kaitannya dengan penghapusan kemiskinan. Misalnya, kebijakan mereka tentang liberalisasi perdagangan dan penghapusan bea-cukai, swastanisasi perusahaan negara, swastanisasi lahan pertanian dan agribisnis, semuanya membawa dampak negative terhadap kelompok miskin dan petani kecil.¹⁷

-Neoliberalisme

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuatan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja.¹⁸

Neoliberalisme memfokuskan diri pada faktor-faktor yang berpengaruh seperti pemerintahan demokratik, pendapat umum ,

¹⁷ Ibid, hal.7

¹⁸ International Chamber of Commerce policy and Business Practices

pendidikan untuk rakyat, perdagangan bebas, organisasi dan hukum internasional, pengawasan dan pelucutan senjata, pengawasan bersama antara negara dan diplomasi multilateral, dan etika global untuk meningkatkan taraf hidup di dunia ini. Sebab kaum neoliberal ini merasa bahwa perubahan kondisi global sebagai peningkatan usaha-usaha kerja sama. Para teoritikus neoliberal tetap mempertahankan ide-ide dan tujuan-tujuan mulia dari warisan paham liberal yang dapat menggambarkan menjelaskan, memprediksi dan menentukan situasi dunia pasca perang dingin.¹⁹

Paham neoliberal bertumpu pada tiga hal fundamental, yaitu perdagangan bebas barang dan jasa, perputaran modal yang bebas dan kebebasan berinvestasi. Menurut argumentasi mereka, segala intervensi pemerintah di dunia ekonomi semenjak tahun 1930-an hanya mengakibatkan industri-industri menjadi pemboros yang tidak efisien. Ambruknya blok Soviet, serta kemandegan dan kesengsaraan Amerika Selatan dan Afrika, menurut mereka telah membuktikan betapa celaknya konsekuensi intervensi pemerintah. Kemiskinan di dunia ketiga hanya dapat diatasi dengan menerapkan kebijakan pasar bebas, melalui kegiatan WTO, IMF, dan World Bank.²⁰

Seperti paham realisme dan neoliberalisme, paham neoliberalisme juga tidak mewakili oleh karenanya tidak bisa dianggap sebagai sebuah gerakan intelektual atau paham pemikiran

¹⁹ Charles W. Kegley, Jr. Eugene R. Wittkopf, *World Politics Trend and Transformation*, Boston, New York, 199, hal. 34.

²⁰ Terjemahan Jurnal International Socialism, Chris Harman, *Anti-Capitalism: Theory and Practice*, No. 88, London, 2000 oleh Julian dan Setia Budi.

tertentu. Neoliberal berlaku pada beberapa asumsi, yang mengevaluasi beberapa aspek dari proses-proses perubahan di dunia internasional dan menyuguhkan satu ide kerjasama. Semua pengikut paham neoliberalisme, meskipun memiliki beberapa karakter dan fokus kajian konvergensi dan overlapping (tumpang tindih) antara entitas kedaulatan politik yang saling berlawanan sedemikian hingga memungkinkan terjadi saling kerjasama.²¹

Doktrin-doktrin neoliberal pertama diucapkan dalam ideologi konservatif yang dijuluki “*Thatcherism*” di Inggris dan “*Reaganomics*” di Amerika. Kemudian logika neoliberal disambut oleh golongan sosial demokratik dalam program “*the Third Way*” yang juga pro kapitalis. Ide-ide neoliberal menjadi pondasi bagi kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga ekuangan internasional seperti WTO, IMF dan World Bank, dan program-program “reformasi ekonomi” yang diajukan oleh para politikus dan ahli ekonomi.²²

Kebijakan lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut selalu mengarah kepada privatisasi (yang selalu didahului oleh restrukturisasi) dan liberalisasi lewat mesin mereka : pinjaman (loan). Setiap pinjaman yang diberikan kepada negara-negara debitor selalu disertai prasyarat (*conditionalities*) yang lebih dikenal sebagai *Structural Adjustment Programme/SAP*). Fungsi utama SAP adalah untuk merombak sistem lama di suatu negara agar sesuai dengan

²¹ Charles W. Kegley, Jr. Eugene Wittkopf. Op.Cit, hal.34.

²² Chris Harman, *Op.Cit.*

mekanisme pasar bebas yang diusung oleh paham neoliberal.²³ Lembaga-lembaga tersebut menjadi pendukung utama model ekonomi neoliberal yang semakin memiskinkan jutaan penduduk miskin di dunia. Hal ini karena kebijakan-kebijakan mereka memang tidak ada kaitannya dengan penghapusan kemiskinan.

C. Hipotesa

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah ditulis dapat diambil hipotesa sederhana yang dapat menjawab pertanyaan di atas.

Bantuan hutang yang diberikan Institusi Bretton Woods menciptakan ketergantungan baru bagi negara berkembang seperti Indonesia, karena negara yang menerima bantuan tersebut harus menjalankan *Structural Adjustment Programs* yang merugikan pemerintah Indonesia baik secara ekonomi maupun politik.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu berdasarkan kerangka teori, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data – data empiris yang ada. Penulis ini lebih bersifat *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti buku, surat kabar, jurnal, artikel, dan menggunakan situs – situs yang terkait dengan dampak globalisasi terhadap demokrasi sebagai pencarian referensi yang baik dan relevan.

²³ *Ibid*

E. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatif, menjelaskan bagaimana pengaruh Institusi Bretton Woods melemahkan peran negara di Indonesia. Sehingga masalah institusi Bretton Woods tersebut menjadi inti masalah dari persoalan melemahnya peran negara di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa globalisasi ini membawa serta pengaruh neoliberalisme yang mengikis peran negara. Untuk menghindari meluasnya serta tak terarahnya penulisan ilmiah ini, maka penulis membatasi jangkauan penelitian. Yaitu Pengaruh Institusi Bretton Woods Terhadap Melemahnya Peran Negara di Indonesia 2004 - 2014. Pembatasan ini dimaksudkan agar penulis dapat fokus dan mempermudah penelitian serta pengumpulan data.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam hal ini terbagi menjadi 5 bab, antara lain adalah:

Bab pertama : Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran , hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua : Menjelaskan tentang peran institusi Bretton Woods dalam lingkup Global.

Bab ketiga : Arah kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengambilan kebijakan negara (ekonomi dan politik) .

Bab keempat : Implikasi Bank Dunia pada peran negara di Indonesia.

Bab kelima : dalam bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan terkait bab yang sebelumnya dibahas.